

RENCANA KERJA



**Badan Penghubung Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2026**



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000-7.2/251/Bappada - 9.51/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

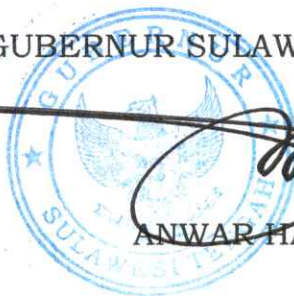
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubenrur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ... 6 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

1. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;

22. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
30. Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah;
38. Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
40. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami dapat menyusun Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang merupakan salah satu dari pelaporan rutin Badan Penghubung Daerah pada Setiap awal Tahun Anggaran Baru.

Rencana Kinerja ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan tujuan, sasaran, program kerja dan kegiatan tahun berikutnya.

Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan Rencana Kerja Tahunan Badan Penghubung Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur ikut mengemban tugas menyukseskan visi dan misi Gubernur.

Sejalan dengan tanggung jawab tersebut dengan telah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Perubahan Tahun 2021- 2026, maka Badan Penghubung dengan tugas fungsi yang dimiliki dan berpedoman pada RPJMD Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 tersebut, telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2026.

Dengan tugas dan fungsi utama adalah pelayanan dan perwakilan Sulawesi Tengah di Jakarta maka program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah menekankan pada peningkatan koordinasi dari Pusat ke Daerah maupun dari Daerah ke Pusat dan fasilitasi dibidang promosi daerah.

Akhirnya teriring harapan mudah-mudahan dengan tersusunnya Rencana Strategi Badan Penghubung Daerah ini dapat menjadi landasan baik kedalam yaitu unsur staf pelaksana yang ada di Badan Penghubung Daerah maupun keluar yakni kepada para stake holder.

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Tingkat I
NIP: 19770104 199612 1 001

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4

BAB 2 HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	16
3.3	Program dan Kegiatan	16

BAB 4	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
-------	--	----

BAB 5	PENUTUP	26
-------	---------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan RKPD, penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan akhir yang dilakukan sesudah ditetapkan sebagai dokumen Renja Definitif serta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja SKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renja SKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Renja Tahun 2026 Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen penerjemah dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan PD untuk menetapkan program kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui capaian kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD pada tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Awal Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur dan berelevansi terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, meliputi sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) PD Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah ;

1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
3. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra SKPD;
4. Keselarasan program dengan penganggaran;
5. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1(satu) tahun anggaran;
2. Merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja (Renja) RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab mengampu urusan Pelayanan Penghubung yang secara khusus memuat satu program, satu kegiatan dan empat sub kegiatan. Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memuat 7 kegiatan dan 10 sub kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun lalu dapat dilihat di table berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5	07				Pengelolaan Penghubung									
5	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks RB Perangkat Daerah			61,56	80,05	130%	62,56	100	100
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		72,8	76,44	73,4	96	77,44	100	100
5	07	01	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen capaian IKU Perangkat Daerah.		100%	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	100	100
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah			75	75	100	80%	100	100
5	07	01	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen pengusulan gaji dan tunjangan yang ditindaklanjuti menjadi SPM		100%	100%	100%	100	100%	100	100
5	07	01	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM		100%	100%	100%	100	100%	100	100

5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah			56	56	100	58	100	100
5	07	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK		6 orang	8 orang	8 orang	100	10 orang	100	100
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan			70	70	100	72	100	100
5	07	01	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	100	100
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks tata Kelola PBJ perangkat daerah			80	80	100	82	100	100
5	07	01	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
5	07	01	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	100	100
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE Perangkat Daerah			2,60	2,60	100	2,70	100	100
5	07	01	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM		1 layanan	1 layanan	1 layanan	100	1 layanan	100	100
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara			3 laporan	3 laporan	100	100%	100	100
5	07	01	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau		53 unit	55	55	100	57 unit	100	100

					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
5	07	01	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara		47 unit	49	49	100	51 unit	100	100
5	07	01	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara		3 unit	3	3	100	3 unit	100	100
5	07	02			Program Pelayanan Penghubung	Persentase permohonan peninjauan komunikasi yang dilayani		-	75	75,9	101	77%	100	100
						Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan promosi UKM		-	75	76,4	102	77%	100	100
						Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan fasilitasi pentas seni dan budaya		-	75	75,9	101	77%	100	100
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase perangkat daerah yang berkoordinasi dengan lembaga hasil peninjauan komunikasi		-	75	75,9	101	100%	100	100
						Persentase pengunjung yang puas atas promosi UKM		-	75	76,4	102	100%	100	100
						Persentase partisipan pentas seni budaya yang puas dengan pelayanan fasilitasi		-	75	75,9	101	100%	100	100
5	07	02	1.01	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Persentase permohonan informasi publik yang terlayani		-	80%	75,9	96	100%	100	100

5	07	02	1.01	2	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Persentase permohonan koordinasi antar lembaga yang terlayani		-	80%	76,4	95	100%	100	100
5	07	02	1.01	3	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase umpan balik yang diterima untuk kegiatan pameran dan pentas seni budaya		-	60%	75,9	127	100%	100	100
5	07	02	1.01	4	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah kegiatan pameran UKM dan dan pentas seni yang difasilitasi		-	4 kegiatan	6	150	10 kegiatan	100	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat menganalisis hasil kinerja pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka kita perlu melihat terlebih dahulu rekam jejak pencapaian kinerja pelayanan berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks kepuasan masyarakat			78	80	88,5	90	80,3	76,2	89	91	

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat bahwa selama tiga tahun terakhir Badan Penghubung konsisten mencatat capaian di atas 95%, tetapi untuk tahun 2024 capaian tercatat di bawah tahun sebelumnya walaupun masih mencapai target. Penurunan capaian ini salah satunya diakibatkan perubahan komponen formulasi indeks kepuasan Masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga ada beberapa komponen yang mencatat hasil di bawah tahun sebelumnya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jakarta dan berlokasi di jantung kota, sangat strategis sebagai terminal penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kantor-kantor pusat pemerintahan dan kantor-kantor perwakilan Negara asing serta pusat perdagangan yang ada di Jakarta.

Disamping letaknya yang strategis dengan ditunjang sarana yang memadai baik gedung, kendaraan operasional, mess, sumber daya manusia dan biaya sudah sepatutnya Badan Penghubung Daerah dapat menjalankan roda organisasi secara baik dalam arti cepat, akurat, akuntabel dalam tugas-tugas pelayanan.

Selain itu Badan Penghubung Daerah juga mengelola anjungan daerah yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, dimana keberadaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, disamping secara wujud fisiknya merupakan replika sebagian kekayaan budaya daerah, terutama dalam bentuk arsitektur bangunan rumah-rumah adat beserta perabot-perabot khasnya, tetapi secara aktivitas diharapkan menjadi salah satu garda depan dalam ikut mengenalkan, menyebarluaskan dan mempromosikan potensi daerah, khususnya kerajinan, industri kecil, obyek-obyek wisata dan seni budaya daerah.

Sebagai tempat rekreasi yang murah dan ramai pengunjung baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing, terutama pada bulan-bulan tertentu didukung dengan kegiatan-kegiatan besar lainnya, maka Taman Mini “Indonesia Indah” termasuk didalamnya adalah Anjungan Daerah masih cukup efektif sebagai “ Show Window “ berbagai potensi daerah melalui pameran, promosi dan pertunjukan seni budaya daerah.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya serta tantangan yang dihadapi Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai fasilitator, regulator dan eksekutor dalam berbagai urusan maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai satuan kerja perangkat daerah harus mampu berperan aktif dalam memperkuat pencapaian visi, misi dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk mengetahui disparitas antara apa yang ada di dalam Renja dan apa yang telah terlebih dahulu dicanangkan sebagai rencana kerja PD, maka perlu dilakukan perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Renja PD yang ada sekarang. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Penghubung Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jakarta	Indeks RB Perangkat Daerah		14.212.995.767	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jakarta	Indeks RB Perangkat Daerah	63,56	9.391.902.457,44	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		500.418.064	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,44	511.610.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jakarta	Tersusunnya dokumen capaian IKU Perangkat Daerah.		500.418.064	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jakarta	Tersusunnya dokumen capaian IKU Perangkat Daerah.	1 dokumen	511.610.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah		8.702.982.238	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	82%	6.946.871.270,44	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Persentase dokumen pengusulan gaji dan tunjangan yang ditindaklanjuti menjadi SPM		6.821.647.462	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Persentase dokumen pengusulan gaji dan tunjangan yang ditindaklanjuti menjadi SPM	100%	5.541.287.270,44	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jakarta	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM		1.881.334.776	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jakarta	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM	100%	1.405.584.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jakarta	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah		131.605.725	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jakarta	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	59	69.200.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK		131.605.725	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK	11 orang	69.200.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan		237.178.401	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan	73	55.387.809	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun		237.178.401	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun	1 dokumen	55.387.809	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Indeks tata Kelola PBJ perangkat daerah		436.010.094	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Indeks tata Kelola PBJ perangkat daerah	83	100.589.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan operasional yang diadakan	4	49.920.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jakarta	Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan		336.010.094	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jakarta	Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan	1 laporan	50.669.090	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Indeks SPBE Perangkat Daerah		1.065.410.834	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Indeks SPBE Perangkat Daerah	2,75	599.812.788	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM		1.065.410.834	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM	1 layanan	599.812.788	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		3.139.390.411	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	1.108.431.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1.086.836.547	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 unit	624.739.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jakarta	Jumlah Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara		64.341.933	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jakarta	Jumlah Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara	51 unit	51.089.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara		1.988.211.931	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	3 unit	432.602.400	
	Program Pelayanan Penghubung	Jakarta	Persentase permohonan peninjauan		1.738.222.593	Program Pelayanan Penghubung	Jakarta	Persentase permohonan peninjauan	100%	1.299.384.620	

			komunikasi yang dilayani					komunikasi yang dilayani			
			Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan promosi UKM					Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan promosi UKM	100%		
			Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan fasilitasi pentas seni dan budaya					Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan fasilitasi pentas seni dan budaya	100%		
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Persentase perangkat daerah yang berkoordinasi dengan lembaga hasil peninjauan komunikasi		1.738.222.593	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Persentase perangkat daerah yang berkoordinasi dengan lembaga hasil peninjauan komunikasi	100%	1.299.384.620	
			Persentase pengunjung yang puas atas promosi UKM					Persentase pengunjung yang puas atas promosi UKM	100%		
			Persentase partisipasi pentas seni budaya yang puas dengan pelayanan fasilitasi					Persentase partisipasi pentas seni budaya yang puas dengan pelayanan fasilitasi	100%		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Persentase permohonan informasi publik yang terlayani		365.799.967	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Persentase permohonan informasi publik yang terlayani	100%	290.984.050	
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Persentase permohonan koordinasi antar lembaga yang terlayani		433.090.373	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Persentase permohonan koordinasi antar lembaga yang terlayani	100%	391.787.250	
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Persentase umpan balik yang diterima untuk kegiatan pameran dan pentas seni budaya		512.200.092	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Persentase umpan balik yang diterima untuk kegiatan pameran dan pentas seni budaya	100%	390.625.820	
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah kegiatan pameran UKM dan pentas seni yang difasilitasi		427.132.161	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah kegiatan pameran UKM dan pentas seni yang difasilitasi	10 kegiatan	225.987.500	

Jika dilihat dari perbandingan di atas, maka kita dapat melihat bahwa perubahan terbesar ada pada nominal pagu untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami penurunan pagu anggaran dari yang tertera dalam RKPD. Penurunan ini terjadi karena adanya kebijakan untuk efisiensi belanja besar-besaran di awal tahun 2025, yang berdampak pada restrukturisasi anggaran 2025 dan berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pagu 2026 saat ini sudah dialokasikan dengan pertimbangan ambang batas minimal anggaran yang memungkinkan efektivitas kegiatan tetap maksimal tetapi tidak berdampak signifikan terhadap realisasi anggaran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai satu-satunya OPD Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan aktivitas harian di wilayah ibu kota DKI Jakarta, memiliki kekhususan kelompok sasaran dalam hal (i) berinteraksi dengan masyarakat diaspora Sulawesi Tengah di DKI Jakarta dan Jabodetabek (ii) berinteraksi dengan Badan Penghubung Daerah lain di wilayah DKI Jakarta, dan (iii) berinteraksi dengan tamu daerah/pejabat daerah/pengunjung/peserta pentas seni dan pameran yang berkunjung ke DKI Jakarta dan Jabodetabek. Interaksi unik tersebut memunculkan beberapa usulan program dan kegiatan yang pada tahun 2026 akan coba digali potensinya lebih lanjut oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

- Pengembangan potensi *gastrodiplomacy* atau diplomasi kuliner, dengan lebih gencar mengenalkan dan menyediakan kuliner-kuliner local khas Sulawesi Tengah kepada masyarakat umum di DKI Jakarta dan Jabodetabek
- Pemetaan pelaku usaha diaspora Sulawesi Tengah di DKI Jakarta, untuk menjaga keeratan nilai daerah serta mendorong pertumbuhan usaha untuk pelaku usaha diaspora Sulawesi Tengah tersebut

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Badan Penghubung Daerah berpedoman pada undang-undang Nomor 25 Tahun 2005. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan pada Tahun 2026 dilaksanakan melalui program-program peningkatan yang telah ditentukan. Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta yang didalamnya termasuk mengelola Anjungan Sulawesi Tengah Taman Mini ” Indonesia Indah ” dengan memperhatikan isu-isu strategis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah mempedomani pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2026, dengan memaksimalkan baik efisiensi anggaran maupun efektivitas kinerja. Sasaran Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, diadaptasi dari Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, Adalah memastikan peningkatan prima pelayanan Penghubung yang prima untuk tahun 2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Sulawesi Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
5	07				Pengelolaan Penghubung				10.691.287.077,44				20.102.176.955
5	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks RB Perangkat Daerah	Jakarta	63,56	9.391.902.457,44	APBD		64,06	17.974.293.906
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jakarta	78,44	511.610.000			79,44	675.564.387
5	07	01	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen capaian IKU Perangkat Daerah.	Jakarta	1 dokumen	511.610.000			1 dokumen	675.564.387
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	Jakarta	82%	6.946.871.270,44			83%	10.878.618.490
5	07	01	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen pengusulan gaji dan tunjangan yang ditindaklanjuti menjadi SPM	Jakarta	100%	5.541.287.270,44			100%	8.527.060.019

5	07	01	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM	Jakarta	100%	1.405.584.000			100%	2.351.558.471
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	Jakarta	59	69.200.000			60	151.346.584
5	07	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK	Jakarta	11 orang	69.200.000			12 orang	151.346.584
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan	Jakarta	73	55.387.809			74	355.766.452
5	07	01	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun	Jakarta	1 dokumen	55.387.809			1 dokumen	355.766.452
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks tata Kelola PBJ perangkat daerah	Jakarta	83	100.589.000			84	971.113.628
5	07	01	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.920.000				517.500.000
5	07	01	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan	Jakarta	1 laporan	50.669.090			1 laporan	453.613.628
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Jakarta	2,75	599.812.788			2,80	1.320.486.406
5	07	01	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM	Jakarta	1 layanan	599.812.788			1 layanan	1.320.486.406

5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Jakarta	100%	1.108.431.500			100%	3.621.397.959
5	07	01	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta	57 unit	624.739.500			57 unit	1.249.862.031
5	07	01	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara	Jakarta	51 unit	51.089.600			51 unit	85.092.207
5	07	01	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	Jakarta	3 unit	432.602.400			3 unit	2.286.443.721
5	07	02			Program Pelayanan Penghubung	Persentase permohonan peninjauan komunikasi yang dilayani	Jakarta	100%	1.299.384.620	APBD		100%	2.127.883.049
						Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan promosi UKM		100%				100%	
						Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan fasilitasi pentas seni dan budaya		100%				100%	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase perangkat daerah yang berkoordinasi dengan lembaga hasil peninjauan komunikasi	Jakarta	100%	1.299.384.620			100%	2.127.883.049
						Persentase pengunjung yang puas atas promosi UKM		100%				100%	
						Persentase partisipan pentas seni budaya yang puas dengan pelayanan fasilitasi		100%				100%	
5	07	02	1.01	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Persentase permohonan informasi publik yang terlayani	Jakarta	100%	290.984.050			100%	374.881.307

5	07	02	1.01	2	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Persentase permohonan koordinasi antar lembaga yang terlayani	Jakarta	100%	391.787.250			100%	374.885.369
5	07	02	1.01	3	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase umpan balik yang diterima untuk kegiatan pameran dan pentas seni budaya	Jakarta	100%	390.625.820			100%	874.719.821
5	07	02	1.01	4	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah kegiatan pameran UKM dan pentas seni yang difasilitasi	Jakarta	10 kegiatan	225.987.500			10 kegiatan	503.396.552

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berikut Adalah rekapitulasi dari rencana kerja dan pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2026:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kualitas pelayanan public bidang Pendidikan, Kesehatan dan perpustakaan	Meningkatnya pelayanan Penghubung yang prima	5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
		5	07				Pengelolaan Penghubung						
		5	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks RB Perangkat Daerah		63,56	10.691.287.077,44	KTU	Jakarta
		5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		78,44	9.391.902.457,44	KTU	Jakarta
		5	07	01	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen capaian IKU Perangkat Daerah.		1 dokumen	511.610.000	KTU	Jakarta
											511.610.000		
		5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah		82%		KTU	Jakarta
		5	07	01	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen pengusulan gaji dan tunjangan yang ditindaklanjuti menjadi SPM		100%	6.946.871.270,44	KTU	Jakarta
		5	07	01	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM		100%	5.541.287.270,44	KTU	Jakarta
											1.405.584.000		

5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah		59		KTU	Jakarta
5	07	01	1.05	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK		11 orang	69.200.000	KTU	Jakarta
									69.200.000		
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan		73		KTU	Jakarta
5	07	01	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun		1 dokumen	55.387.809	KTU	Jakarta
									55.387.809		
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks tata Kelola PBJ perangkat daerah		83		KTU	Jakarta
5	07	01	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.589.000		
5	07	01	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan		1 laporan	49.920.000	KTU	Jakarta
									50.669.090		
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE Perangkat Daerah		2,75		KTU	Jakarta
5	07	01	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM		1 layanan	599.812.788	KTU	Jakarta
									599.812.788		
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100%		KTU	Jakarta

5	07	01	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 unit	1.108.431.500	KTU	Jakarta
5	07	01	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara	51 unit	624.739.500	KTU	Jakarta
5	07	01	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	3 unit	51.089.600	KTU	Jakarta
								432.602.400		
5	07	02			Program Pelayanan Penghubung	Persentase permohonan peninjauan komunikasi yang dilayani	100%	1.299.384.620	Hubungan Antar Lembaga dan Pembinaan Masyarakat	Jakarta
						Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan promosi UKM	100%		Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan	
						Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan fasilitasi pentas seni dan budaya	100%		Promosi dan Informasi	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase perangkat daerah yang berkoordinasi dengan lembaga hasil peninjauan komunikasi	100%	1.132.823.745,49	Hubungan Antar Lembaga dan Pembinaan Masyarakat	Jakarta
						Persentase pengunjung yang puas atas promosi UKM	100%	1.299.384.620	Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan	
						Persentase partisipasi pentas seni budaya yang puas dengan pelayanan fasilitasi	100%		Promosi dan Informasi	
5	07	02	1.01	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Persentase permohonan informasi publik yang terlayani	100%	264.693.244,80	Hubungan Antar Lembaga dan Pembinaan Masyarakat	Jakarta

		5	07	02	1.01	2	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Persentase permohonan koordinasi antar lembaga yang terlayani		100%	290.984.050	Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan	Jakarta
		5	07	02	1.01	3	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase umpan balik yang diterima untuk kegiatan pameran dan pentas seni budaya		100%	391.787.250	Promosi dan Informasi	Jakarta
		5	07	02	1.01	4	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah kegiatan pameran UKM dan pentas seni yang difasilitasi		10 kegiatan	390.625.820	Hubungan Antar Lembaga dan Pembinaan Masyarakat	Jakarta

BAB 5

PENUTUP

Dokumen Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 memuat rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan serta langkah-langkah strategis pelaksanaan aktivitas Badan Penghubung Daerah untuk kurun waktu tahun 2026. Dokumen ini telah mengacu kepada dokumen Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan akan mempedomani seluruh aktivitas Badan Penghubung Daerah selama periode tahun 2026.

Kaidah pelaksanaan dokumen ini Adalah memaksimalkan efisiensi tanpa mengorbankan efektivitas dan selalu terbuka dengan umpan balik serta ide-ide inovasi dari kelompok sasaran. Artinya, seluruh pelaksanaan aktivitas Badan Penghubung Daerah di tahun 2026 harus diupayakan untuk tercapai sesuai target yang ditetapkan, atau bahkan melebihi target apabila pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan melebihi pagu yang tertera di dokumen Renja ini. Selain itu, sebagai salah satu perangkat daerah yang berinteraksi dengan kelompok sasaran yang cukup bervariasi, Badan Penghubung Daerah harus siap menerima segala bentuk umpan balik dari kelompok sasaran, baik yang negatif sebagai bahan analisis kelemahan pelayanan, maupun yang positif sebagai jendela untuk mengembangkan inovasi pelayanan baru.

Rencana tindak lanjut untuk tahun 2026, sebagai tahun awal periode Renstra yang baru, Adalah untuk memastikan fase transisi dari Renstra lama ke Renstra baru berjalan tanpa adanya data dan informasi yang hilang. Langkah ini menjadi penting untuk menjaga kesinambungan operasional Badan Penghubung, terlepas dari perubahan langkah strategis dan politis di lingkup seluruh Provinsi Sulawesi Tengah.


**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Tingkat I
NIP: 19770104 199612 1 001

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 900.1.1.2/11/BPST.01

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terarah dan tata pemerintahan yang baik untuk pelaksanaan program kegiatan tahun 2026, maka perlu disusun Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) di Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b Bahwa Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
- 3 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH**

KESATU : 1 Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026
Badan Penghubung Daerah Sulawesi Tengah dengan
nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini;

2 Tim sebagaimana pada diktum pertama bertugas
mempersiapkan, merencanakan, mengkoordinir,
menyusun, dan melaporkan dokumen dimaksud;.

KEDUA : Tim bertanggung jawab terhadap data yang diberikan dalam
penyusunan dokumen dimaksud;

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 Badan
Penghubung Daerah Sulawesi Tengah bertanggung jawab
kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Jakarta, 7 Januari 2025
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Tingkat I
NIP: 19770104 199612 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

Nomor : 900.1.1.2/11/BPST.01

Tanggal : 07 Januari 2025

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Jabatan	NAMA	Keterangan Jabatan Instansi
1	2	3	4
	Ketua	Jemmy Fischer, S.STP	Kepala Badan
1	Sekretaris	Ika Rahmawati.P, SP, Msi	Kasubag TU
2	Anggota	Nurhikmawati, SH.MA	Kasubag Informasi dan Promosi
3	Anggota	Yenny Herowati,SE.M.Si	Kasubag HAL dan Bimas
4	Anggota	Noviva Debby Sumampouw, S.Sos	Kasubag PDB
5	Anggota	Uweys Alqorney, S.T	Staf
6	Anggota	Randie Ananda Agam	Staf
7	Anggota	Rustiyani Lapasiri	Staf

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



JEMMY FISCHER, SSTP

Pembina Tingkat I

NIP: 19770104 199612 1 001

